

The Green Revolution in Gili Balu: Policy Convergence, *Blue Economy*, and Community Empowerment

Jalaluddin^{1*} & Hayati²

¹Universitas Cordova Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

²Doktor Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

Article History

Received : January 09th, 2026

Revised : June 30th, 2026

Accepted : July 09th, 2026

*Corresponding Author:

Jalaluddin, Program Studi
Doktor Pertanian
Berkelanjutan, Universitas
Mataram, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia;
Email:
jalaluddinmpm@gmail.com.

Abstract: The Green Revolution has become a prominent policy framework for promoting sustainable development in Indonesia's marine and fisheries sector. However, its implementation in small island regions often reveals a significant gap between policy objectives and local socio-ecological realities. This study aims to critically examine the convergence and tensions among the Green Revolution as a policy framework, the *Blue Economy* as a development model, and community empowerment as the ultimate goal of sustainable development in small island contexts. Using a qualitative approach, this study employs a Critical Narrative Review of 13 selected articles and policy documents, complemented by contextual reflections on Gili Balu, a small island cluster in West Sumbawa Regency, Indonesia. The analysis identifies three dominant themes: technocratic development approaches, community-based *Blue Economy* practices, and participatory empowerment. The findings indicate that while these concepts are theoretically complementary, their implementation is often constrained by weak local institutions, limited community authority, fragmented policy integration, and unequal access to resources. In Gili Balu, locally driven initiatives such as community-based tourism and marine resource conservation demonstrate the potential of adaptive and inclusive governance. The study concludes that sustainable transformation in small islands requires stronger integration between policy frameworks, local institutions, and community participation. The novelty of this study lies in its integrated analytical framework that connects Green Revolution, *Blue Economy*, and community empowerment to explain the dynamics of sustainable development in small island regions.

Keywords: Blue Economy; Community Empowerment; Gili Balu; Green Revolution; Small Islands; Sustainable Development.

Pendahuluan

Satu dekade terakhir, narasi *Green Revolution* di sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (KKP 2020). Konsep ini dipahami sebagai transformasi pembangunan yang mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka tersebut, *Blue Economy* diposisikan sebagai pendekatan operasional yang mengarahkan pemanfaatan sumber daya laut secara efisien, restoratif, dan berorientasi pada penciptaan nilai

tambah ekonomi tanpa mengabaikan kapasitas ekologi (Barrie & Liebender-Luc, 2016; Gunter, 2010). Ekonomi biru merefleksikan pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi dari sumber daya laut daratan perairan dan pesisir untuk ketahananpangan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Karani et al., 2022).

Menurut Smith-Godfrey (2016), *Blue Economy* tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kelautan, tetapi juga menekankan keseimbangan antara keberlanjutan ekologis, kesejahteraan sosial, dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan. Implementasi kedua konsep tersebut pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil (P3K), sehingga masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya dan memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Kaunang et al., 2025).

Meskipun hubungan konseptual antara *Green Revolution*, *Blue Economy*, dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dikemukakan dalam berbagai dokumen kebijakan dan kajian akademik, implementasinya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai program pembangunan cenderung berfokus pada peningkatan produktivitas dan infrastruktur ekonomi, sementara aspek penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, dan tata kelola sumber daya belum memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dengan realitas sosial ekologis yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi semakin relevan pada kawasan pulau kecil seperti Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat, yang memiliki karakteristik keterbatasan sumber daya, kerentanan ekologis, dan ketergantungan tinggi terhadap sektor kelautan dan pariwisata. Karakteristik tersebut merupakan ciri umum wilayah pulau kecil yang memiliki kapasitas sumber daya terbatas, ketergantungan tinggi terhadap ekosistem pesisir, serta kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan tekanan pembangunan (Barnett & Waters, 2016; Kelman, 2018; Walshe & Stancioff, 2018).

Meskipun berbagai kebijakan *Green Revolution* dan pembangunan berkelanjutan telah banyak dikaji, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang optimis di tingkat makro dengan realitas implementasi yang kompleks di tingkat lokal, khususnya pada wilayah kepulauan kecil dan terpencil seperti Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi capaian program, efektivitas kebijakan, atau aspek teknis pengelolaan sumber daya, sehingga masih terbatas dalam mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial ekologis masyarakat, relasi kuasa antaraktor, serta proses pemberdayaan yang berlangsung di tingkat komunitas (Ansell & Gash, 2008; Bennett et al., 2021a). Selain itu, kajian yang menghubungkan secara simultan kerangka *Green Revolution*, pendekatan *Blue Economy*, dan praktik

pemberdayaan masyarakat dalam konteks pulau kecil masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian ini menempati posisi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya dengan menawarkan analisis kritis mengenai konvergensi dan ketegangan antara ketiga dimensi tersebut. Kebaruan kajian ini terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan perspektif kebijakan, ekonomi biru, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka analisis yang digunakan untuk memahami transformasi pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan kecil, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan melakukan tinjauan kritis dengan menjadikan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai lensa untuk memahami dinamika implementasi pembangunan berkelanjutan pada wilayah pulau kecil. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana *Green Revolution* sebagai kerangka kebijakan, *Blue Economy* sebagai model pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan pembangunan berinteraksi, berkonvergensi, atau justru menimbulkan kontradiksi dalam konteks sosial ekologis pulau kecil? Kajian ini memiliki urgensi akademik karena masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan, tata kelola sumber daya, dan kapasitas masyarakat lokal. Dari sisi kebijakan, kegagalan memahami keterkaitan tersebut berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bersifat sektoral, kurang responsif terhadap kondisi lokal, serta tidak mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan ekologis masyarakat pesisir. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperdalam kerentanan sosial ekologis, memperlemah efektivitas investasi pembangunan, dan menghambat terwujudnya transformasi berkelanjutan di wilayah pulau kecil.

Bahan dan Metode

Desain Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Critical Narrative Review* (CNR). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya

mengidentifikasi dan merangkum temuan-temuan penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan sintesis, interpretasi, dan evaluasi kritis terhadap konsep, kebijakan, serta praktik yang berkembang dalam suatu bidang kajian (Greenhalgh et al., 2018). Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara *Green Revolution*, *Blue Economy*, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan di wilayah pulau kecil.

Sumber data diperoleh dari literatur ilmiah yang diakses melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA. Penelusuran literatur dilakukan pada periode Januari–Maret 2026 menggunakan kata kunci: “*Green Revolution perikanan Indonesia*”, “*Ekonomi Biru pulau kecil*”, “*pemberdayaan masyarakat pesisir*”, “*ketahanan pulau kecil*”, dan “*tata kelola pesisir*”.

Hasil pencarian awal memperoleh 45 artikel dan dokumen. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan relevansi topik, keterkaitan dengan tujuan penelitian, ketersediaan naskah lengkap, serta rentang publikasi tahun 2015–2025, diperoleh 13 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Selain artikel ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional yang relevan dengan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil.

Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan literatur, yaitu menelusuri berbagai publikasi yang berkaitan dengan *Green Revolution*, *Blue Economy*, pemberdayaan masyarakat pesisir, ketahanan pulau kecil, dan tata kelola sumber daya pesisir. Pada tahap ini dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber yang digunakan.

Tahap kedua adalah analisis dan sintesis literatur. Seluruh artikel yang terpilih dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan antar konsep, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta narasi dominan yang berkembang dalam literatur. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip *Critical Narrative Review* (CNR) yang menekankan proses interpretasi kritis terhadap asumsi, perspektif, dan implikasi

kebijakan yang terkandung dalam setiap kajian (Baumeister & Leary, 1997; Greenhalgh et al., 2018).

Tahap ketiga adalah integrasi dengan studi kasus Gili Balu. Hasil sintesis literatur kemudian direfleksikan pada konteks empiris Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat. Integrasi dilakukan menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen pemerintah daerah, laporan desa, berita lokal, laporan pembangunan kawasan wisata, dan berbagai studi terdahulu yang relevan. Tahapan ini bertujuan untuk menguji relevansi temuan konseptual dengan kondisi nyata serta membangun argumentasi yang lebih kontekstual mengenai implementasi *Green Revolution* dan *Blue Economy* pada wilayah pulau kecil.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Seluruh literatur yang telah terseleksi dikodekan berdasarkan tema-tema utama, yaitu kebijakan *Green Revolution*, implementasi *Blue Economy*, pemberdayaan masyarakat, tata kelola sumber daya, dan ketahanan sosial ekologis. Proses pengelompokan tema dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel* untuk memudahkan pengorganisasian data, pemetaan hubungan antartema, dan penyusunan matriks sintesis literatur.

Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan data sekunder dari Gili Balu untuk mengidentifikasi bentuk konvergensi maupun kontradiksi antara kebijakan, model pembangunan, dan praktik pemberdayaan masyarakat. Hasil interpretasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi kritis mengenai peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan pembangunan berkelanjutan pada wilayah pulau kecil.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap 13 artikel dan dokumen kebijakan yang memenuhi kriteria seleksi, teridentifikasi tiga tema utama yang secara konsisten muncul dalam kajian pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil, yaitu *Green Revolution* sebagai kerangka kebijakan pembangunan (KKP 2020; Sachs 2015), *Blue Economy* sebagai model pengelolaan sumber daya (Dian et al., 2023; Smith-Godfrey,

2016; Wold Bank, 2017), dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan pembangunan (Chambers, 1997).

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut secara normatif saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, pada tingkat implementasi ditemukan berbagai ketegangan yang muncul akibat perbedaan orientasi kebijakan, kapasitas kelembagaan lokal, serta karakteristik sosial-ekologis wilayah pulau kecil (Béné et al., 2016; Bennett et al., 2021b; Ostrom, 2009). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan dan inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan dimensi ekologis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka tata kelola yang adaptif (Satria Arif, 2026). Gili Balu digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana ketiga konsep tersebut berinteraksi dalam praktik pembangunan di tingkat lokal.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Sintesis Literatur

Tema	Temuan Utama	Implikasi bagi Gili Balu
<i>Green Revolution</i>	Didominasi pendekatan teknokratik dan <i>top-down</i>	Membutuhkan adaptasi terhadap kondisi lokal
<i>Blue Economy</i>	Potensi tinggi tetapi implementasi sering tidak inklusif	Memerlukan penguatan kelembagaan komunitas
Pemberdayaan	Partisipasi sering bersifat konsultatif	Perlu peningkatan otoritas masyarakat dalam pengambilan keputusan
Tata kelola	Kelembagaan lokal berpengaruh terhadap keberlanjutan	<i>Co-management</i> menjadi alternatif strategis

Green Revolution

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *Green Revolution* dalam sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih didominasi oleh paradigma teknokratik yang menempatkan teknologi, regulasi, dan program pemerintah sebagai instrumen utama perubahan (Patel, 2013;

Sachs et al., 2013). Berbagai studi mengindikasikan bahwa pendekatan tersebut mampu meningkatkan efisiensi produksi, tetapi sering kali kurang mempertimbangkan keragaman sosial ekologis yang menjadi karakteristik wilayah pesisir dan pulau kecil (Radosavljevic et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan Béné et al. (2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan tanpa dukungan tata kelola yang inklusif. Literatur mengenai pengelolaan pulau kecil menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik ekologis dan sosial lokal berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekosistem serta memperbesar kerentanan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan diri dengan konteks sosial ekologis setempat (Akbar, 2017; Pelling & Uitto, 2001).

Konteks Gili Balu, temuan-temuan literatur menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan pengetahuan lokal, kemampuan ekonomi masyarakat, dan struktur kelembagaan yang ada. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang secara seragam berpotensi mengalami distorsi implementasi karena tidak mampu menjawab persoalan mendasar seperti akses terhadap ruang kelola, pasar, dan sumber daya ekonomi. Temuan kunci sintesis ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Green Revolution* pada wilayah pulau kecil lebih ditentukan oleh kemampuan kebijakan beradaptasi dengan konteks lokal daripada oleh tingkat kecanggihan teknologi yang diintroduksikan.

Blue Economy

Sintesis berbagai studi menunjukkan bahwa konsep *Blue Economy* berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya laut (Smith-Godfrey, 2016; Wold Bank, 2017).. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Blue Economy* sering kali lebih berorientasi pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi sektor kelautan

dibandingkan penguatan kapasitas masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan tidak selalu terdistribusi secara merata kepada komunitas pesisir (Cohen et al., 2019).

Pada kasus Gili Balu, praktik-praktik yang mencerminkan prinsip ekonomi biru justru muncul secara organik melalui inisiatif masyarakat, seperti perlindungan terumbu karang, pengelolaan wisata berbasis komunitas, dan pengurangan praktik penangkapan ikan yang merusak. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa praktik ekonomi biru pada komunitas pesisir sering berkembang melalui mekanisme adaptasi lokal, pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, dan pemanfaatan kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun (Berkes, 2003; Sartia Arif, 2015)

Meskipun demikian, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi keterbatasan berupa lemahnya dukungan kelembagaan, akses pembiayaan, dan integrasi dengan rantai nilai ekonomi yang lebih luas. Hasil sintesis ini mengindikasikan bahwa efektivitas *Blue Economy* pada pulau kecil bergantung pada kemampuan menghubungkan inisiatif lokal dengan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang berkelanjutan (Andaiyani et al., 2024).

Pemberdayaan Masyarakat

Analisis literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan yang hampir selalu hadir dalam dokumen kebijakan pembangunan pesisir. Namun demikian, berbagai studi menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultatif (*consultation*) dan belum mencapai tingkat *citizen control* sementara pengambilan keputusan strategis tetap berada pada aktor eksternal (Arnstein, 1969). Chambers (1997) menegaskan bahwa pemberdayaan yang efektif menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan menentukan prioritas, mengelola sumber daya, dan mengendalikan proses perubahan sosialnya sendiri.

Konteks Gili Balu, keberhasilan beberapa inisiatif konservasi dan pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa rasa memiliki (*sense of ownership*) menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan program. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk menentukan aturan, mengelola sumber daya, dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, tingkat

partisipasi dan komitmen terhadap keberlanjutan cenderung meningkat (Kasus et al., 2025).

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan tidak cukup dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi harus mencakup transfer kewenangan, kapasitas, dan akses terhadap sumber daya (Winata, 2023). Dengan demikian, hasil sintesis menegaskan bahwa pemberdayaan yang substantif hanya dapat dicapai melalui redistribusi otoritas dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal.

Konvergensi dan Ketegangan *Green Revolution*, *Blue Economy*, dan Pemberdayaan di Gili Balu

Sintesis literatur memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat simultan antara konvergensi dan ketegangan di antara ketiga konsep tersebut. Konvergensi terjadi ketika kebijakan pemerintah mampu mendukung inisiatif ekonomi biru berbasis masyarakat melalui penguatan kapasitas, pendanaan, dan perlindungan sumber daya. Dalam kondisi ini, tujuan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Perspektif *Social Ecological Systems* menjelaskan bahwa keberlanjutan bergantung pada interaksi adaptif antara sumber daya alam, kelembagaan, dan aktor sosial yang membentuk sistem pengelolaan secara terpadu (Ostrom 2019).

Sebaliknya, ketegangan muncul ketika orientasi pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam kebijakan investasi dan pengembangan pariwisata berskala besar tidak sejalan dengan kapasitas ekologis pulau kecil maupun kebutuhan masyarakat lokal. Situasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan manfaat ekonomi, konflik pemanfaatan ruang, dan degradasi lingkungan (Nurhasanah et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis investasi dan pertumbuhan ekonomi sering menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat, marginalisasi masyarakat lokal, konflik pemanfaatan ruang, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir apabila tidak disertai mekanisme tata kelola yang inklusif dan berkeadilan (Putri et al., 2025).

Temuan utama kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Gili Balu tidak ditentukan oleh keberadaan *Green Revolution*, *Blue Economy*, atau

pemberdayaan masyarakat secara terpisah, melainkan oleh tingkat integrasi dan keselarasan di antara ketiga dimensi tersebut.

Kesimpulan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *Green Revolution*, *Blue Economy*, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tiga dimensi yang secara konseptual saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada wilayah pesisir dan pulau kecil. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai ketegangan yang bersumber dari dominasi pendekatan teknokratik, lemahnya pengakuan terhadap kelembagaan lokal, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada konteks Gili Balu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh introduksi teknologi, investasi, atau program pemerintah, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekologis lokal, kearifan masyarakat, dan kapasitas kelembagaan komunitas.

Kajian ini menemukan bahwa praktik-praktik ekonomi biru yang berkembang secara organik melalui pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi dan ekologis pulau kecil. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh akses pembiayaan, dukungan kelembagaan, dan integrasi kebijakan yang belum optimal. Oleh karena itu, transformasi pembangunan berkelanjutan di Gili Balu memerlukan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi proyek fisik menuju tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berbasis pemberdayaan. Kebaruan kajian ini terletak pada integrasi perspektif *Green Revolution*, *Blue Economy*, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan dinamika konvergensi dan ketegangan pembangunan berkelanjutan pada wilayah pulau kecil.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pada kajian ini khususnya pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dan pemerinta Desa Poto tano serta informan dari masyarakat yang telah banyak memberikan masukan sehingga selesainya penelitian.

Referensi

- Akbar, M. (2017). Analisis Kerentanan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus P. Kukumbi, P. Enam, P. Mogo, P. Kadidiri, P. Pagempa, P. Tongkabo). *Omni-Akuatika*, 12(3). <https://doi.org/10.20884/1.OA.2016.12.3.126>
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85. <https://doi.org/10.52813/JEI.V13I1.324>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Barnett, J., & Waters, E. (2016). Rethinking the vulnerability of small island states: Climate change and development in the Pacific Islands. *The Palgrave Handbook of International Development*, 731–748. https://doi.org/10.1057/978-1-137-42724-3_40/SAVE-RESEARCH
- Barrie, S., & Liebender-Luc, A.-S. (2016). The Ocean Economy in 2030. *The Ocean Economy in 2030*. <https://doi.org/10.1787/9789264251724-EN>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:RGPA;JOURNAL:JOURNAL:RGPA;WGR OUP:STRING:PUBLICATION
- Béné, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., Campling, L., Leschen, W., Little, D., Squires, D., Thilsted, S. H., Troell, M., & Williams, M. (2016). Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction: Assessing the Current

- Evidence. *World Development*, 79, 177–196.
<https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2015.11.007>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021a). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387.
<https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2020.104387>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021b). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387.
<https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2020.104387>
- Berkes, F. , C. J. , & F. C. (2003). Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. *Navigating Social-Ecological Systems*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511541957>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*.
<https://www.Cabidigitallibrary.Org/Action/DoSearch?AllField=pb%3A%28%22Intermediate+Technology+Publications+Ltd+%28ITP%29%22%29>
<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19971801093>
- Cohen, P. J., Allison, E. H., Andrew, N. L., Cinner, J., Evans, L. S., Fabinyi, M., Garces, L. R., Hall, S. J., Hicks, C. C., Hughes, T. P., Jentoft, S., Mills, D. J., Masu, R., Mbaru, E. K., & Ratner, B. D. (2019). Securing a just space for small-scale fisheries in the *Blue Economy*. *Frontiers in Marine Science*, 6(MAR), 434657.
<https://doi.org/10.3389/FMARS.2019.00171/TEXT>
- Dian, Adnan, I., Hasana, S., & Assidiq, F. M. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DI INDONESIA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI BIG DATA. In *SENSISTEK* (Vol. 6, Number 2).
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e12931.
<https://doi.org/10.1111/ECI.12931>
- Karani, P., Failler, P., Gilau, A. M., Ndende, M., & Diop, S. T. (2022). Africa *Blue Economy* Strategies Integrated in Planning to Achieve Sustainable Development at National and Regional Economic Communities (RECs). *Journal of Sustainability Research*, 4(3), e220011.
<https://doi.org/10.20900/JSR20220011>
- Kasus, S., Dan, N., Usaha, P., Kecamatan, D., Haji, P., Putra Pratama, J., Rohmansyah, R., Puntodewo, L., & Rahman, F. A. (2025). Ketahanan Masyarakat Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim: Studi Kasus Nelayan dan Pelaku Usaha di Kecamatan Paku Haji. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 20–36.
<https://doi.org/10.55606/JIMAS.V4I1.1709>
- Kaunang, S. D. E., Kaunang, S. D. E., Amanda, T., Suhana, Marlianingrum, P. R., Pahlevi, M. R., & Nusantara, T. S. (2025). Conceptual, Strategy, and Implementation of *Blue Economy* in Marine and Freshwater Fisheries Management. *Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar*, 1(1), 1–8.
<https://doi.org/10.37932/jelawat.v1.i1.916>
- Kelman, I. (2018). Islandness within climate change narratives of small island developing states (SIDS). *Island Studies Journal*, 13 (1) Pp. 149-166. (2018) , 13(1), 149–166.
<https://doi.org/10.24043/ISJ.52>
- KKP. (2020). *KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
<https://www.kkp.go.id/publikasi/akuntabilitas-kinerja/perencanaan-kinerja/detail/rencana-strategis-kkp-tahun-2020-2024664e9edd68c98.html>
- Nurhasanah, I. S., Angely, G., & Rahman, M. B. (2025). Pemberdayaan Komunitas dalam Ekowisata di Pulau Kecil. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 5(1), 82.
<https://doi.org/10.35472/jppk.v5i1.2146>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.
<https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1172133;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Patel, R. (2013). The Long Green Revolution. *The Journal of Peasant Studies*, 40(1), 1–63.

- <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.719224>
- Pelling, M., & Uitto, J. I. (2001). Small island developing states: natural disaster vulnerability and global change. *Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards*, 3(2), 49–62. <https://doi.org/10.3763/EHAZ.2001.0306>
- Putri, H. M., Mira, & Ramadhan, A. (2025). Re-evaluating Island Sustainability: Navigating Tourism Pressures and Ecological Constraints in Archipelagic Development. *Journal of Marine and Island Cultures*, 14(3). <https://doi.org/10.21463/JMIC.2025.14.3.08>
- Radosavljevic, S., Venturino, E., Acotto, F., Wang, Q., Su, J., & Gasparatos, A. (2025). Sustainable intensification of small-scale aquaculture systems depends on the local context and characteristics of producers. <https://arxiv.org/pdf/2502.18488>
- SACHS Jeffrey D Sachs, J. D., of Sustainable Development, P., & of Health Policy, P. (2013). *print/jeffrey-d-sachs-proposes-a-new-curriculum-for-a-new-era EDUCATION The Age of Sustainable Development*. <http://www.project-syndicate.org/>
- Sartia Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir - Arif Satria - Google Buku*. <https://books.google.co.id/books?id=WCNLDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Satria Arif. (2026). *Agromaritim 5.0, IPB Fokus Riset di Bidang Omics, AI, dan Sustainability - Arif Satria*. https://arifsatria-staff.ipb.ac.id/agromaritim-5-0-ipb-fokus-riset-di-bidang-omics-ai-dan-sustainability/?utm_source=chatgpt.com
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the *Blue Economy*. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- The Age of Sustainable Development. (n.d.). Retrieved June 19, 2026, from <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7312/sach17314/html>
- The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs - Gunter A. Pauli - Google Buku. (n.d.).
- Walshe, R. A., & Stancioff, C. E. (2018). Small Island perspectives on climate change. In *Island Studies Journal* (Vol. 13, Number 1, pp. 13–24). University of Prince Edward Island. <https://doi.org/10.24043/isj.56>
- Winata, I. N. P. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 91. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053>
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/523151496389684076>